KEMUDAHAN DALAM PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPEMILIKAN NPWP
(Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cibaduyut)

Ease Taxpayers in Taxation and Tax Socialization Owners On Taxpayer Identification Number

PEMBIMBING :
Jayanthi Octavia, SE., MM

Oleh :
ADE SUHANDI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
adeesuhandi16@gmail.com

ABSTRACT

*This research there are problems, that occur implementing Technical Unit (UPT) Cibaduyut is the difficulty understanding the administration of taxation and the lack of socialization which my affect the ownership TAX ID in Unit Technical Implementers (UPT) Cibaduyut. Aiming to test how its influence the ease in taxation and tax against the socialization of ownership TAX ID in implementing Technical Unit (UPT) Cibaduyut 2017***.**

The research method used is descriptive analysis verifikatif methods with quantitative approach with the unit of analysis that examined is Implementing Technical Unit (UPT) Cibaduyut. And a population of 239 with the using the formula slovin. Data an analysis techniques used are descriptive analysis and verifikatif by using application program software smart PLS 3.

The research results showed that simplicity in the taxation effect significantly to ownership of a positive relationship with the TAX ID, influential Tax significantly to socializing the ownership of TIN with a positive relationship. In partial ownership of TAX ID dominant influence by simplicity in the taxation of 43.49% compared to tax only the socialization of 24.70%

Keywords: Ease in Taxation, Tax, Socialization of Ownership Tax ID

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak, pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Setiap tahun anggaran pemerintahan senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunan.

Begitupula UMKM mampu memberikan kontribusi besar untuk perekonomian Indonesia yaitu sumbangannya terhadap PDB Indonesia. Peranan UMKM terhadap PDB di Indonesia sangat basar terutama pada kelompok usaha mikro sebanyak 35,81%. Jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan data menurut kementrian koperasi pada tahun 2012 sampai 2013 masing-masing adalah 56.534.592 dan 57.895.721 unit usaha. Tetapi, jumlah unit usaha pada masing-masong sektor yaitu mikro, kecil dan menengah yang terbesar jumlahnya.

Perekonomian Indonesia telah didominasi oleh kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan sektor usaha informal yang memiliki peran penting dalam kontribusinya. Namun pada kenyataannya data menunjukan bahwa sebagian besar penerimaan pajak di dominasi oleh wajib pajak yang memiliki badan usaha besar. (Rakhmad, 2012).

Fenomena yang terjadi yaitu bahwa Direktorat Jendral Pajak mencatat terdapat sekitar 8000 kios di blok A pasar tanah abang, tetapi baru sekitar 3000 pemilik kios yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Sayangnya, dari 3000 Wajib Pajak tersebut hanya sekitar 200 Wajib Pajak pemilik kios yang telah membayarkan pajaknya, dari 3000 Wajib Pajak tersebut rata-rata pembayaran pajaknya hanya 500rb, penyebab utama ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ini dikarenakan Wajib Pajak kesulitan memahami administrasi perpajakannya. (Kasi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi, 2013)

Namun berdasarkan fakta/kondisi yang terjadi pada Unit Pelaksana Teknis Cibaduyut menurut Bapak Teguh salah satu pegawai UPT tersebut mengungkapkan bahwa dipersulitnya pengusaha UMKM untuk pengajuan kredit ke bank. Untuk pengajuan kredit ke bank dengan nilai diatas 50 juta salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain itu menurunnya kepemilikan NPWP dapat dilihat dari sosialisasi pajak itu sendiri. Menurut Bapak Teguh salah satu pegawai yang ada di UPT tersebut mengungkapkan bahwa pernah dilakukannya sosialisasi pajak terhadap pengusaha UMKM, namun para pengusaha tersebut tidak tertarik untuk menghadiri sosialisasi dikarenakan mereka takut jika diharuskan membayar sejumlah uang dan malas untuk mengikuti dan memahami prosedur-prosedur yang diberikan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di latar belakang penelitian diatas, penulis identifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1) Berdasarkan latar belakang permasalahannya, bahwa pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat tidak dibarengi dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, hal tersebut terlihat dari masih rendahnya jumlah pemilik UMKM yang mendaftarkan usahanya untuk memiliki NPWP.
2) Bahwa kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran, hal itu disebabkan oleh sulitnya administrasi perpajakan dipahami.
3) Bahwa kurangnya sosialisasi pajak dapat membuat Wajib Pajak enggan membayar pajak dan berimbas pula pada kepemilikan NPWP.

1.3. Rumusan Masalah

1) Seberapa besar pengaruh kemudahan dalam perpajakan terhadap kepemilikan NPWP.
2) Seberapa besar pengaruh Sosialisasi pajak terhadap kepemilikan NPWP.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian
1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai kemudahan dalam perpajakan dan sosialisasi pajak terhadap kepemilikan NPWP di Indonesia.

1.4.2. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepemilikan NPWP
2) Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh kemudahan dalam perpajakan terhadap sosialisasi pajak.

1.5. Kegunaan Penelitian
1.5.1. Kegunaan Praktis

Untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut (Uma Sekaran,2006:10).

1.5.2. Kegunaan Akademis

Kegunaan hasil penelitian ini adalah kelanjutan dari tujuan penelitian. Apabila peneliti telah selesai mengadakan penelitian dan memperoleh hasil, ia dapat diharapkan menyumbangkan hasil itu kepada program studi Akuntansi, atau khususnya kepada bidang yang diteliti, pembicaraan tentang kegunaan penelitian ini dapat menjadi penting setelah beberapa penelitian tidak dapat mengatakan sebenarnya hasil apa yang diharapkan, dan sejauh mana sumbangannya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan (Suharsimi Arikunto, 2006 :99).

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. KAJIAN PUSTAKA
2.1.1. KEMUDAHAN DALAM PERPAJAKAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: kemudahan dalam urusan perpajakan dapat diartikan bahwa Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan dalam melakukan urusan yang berkaitan dengan perpajkan.

Menurut Suharsimi Arikunto, (2009) : kemudahan berarti sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar usahanya, para perajin memperoleh kemudahan dari pemerintah.

2.1.2. Sosialisasi Pajak

Menurut Sugeng Wibowo, (2012) : upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tatacara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Menurut Basmalah, (2007) : sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma, dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif.

Menurut Gunadi, (2007) : untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan menimbulkan kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat.

2.1.3. Kepemilikan NPWP

Menurut Mardiasmo, (2011): nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.2. KERANGKA PEMIKIRAN

2.2.1. Pengaruh Kemudahan dalam perpajakan terhadap Kepemilikan NPWP

Kemudahan merupakan sesuatu hal yang membuat kita menjadi tidak sulit dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini dalam memiliki NPWP Wajib Pajak diberikan kemudahan dalam urusan perpajakannya dan dalam pembuatan NPWP itu sendiri. Kemudahan menurut Supriyadi (2011) menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan menghapus NPWP maupun dalam menjalankan hak serta kewajiban perpajakan setelah memilikinya. Di samping itu semakin tinggi faktor kemudahan dalam perpajakan semakin tinggi tingkat kepemilikan NPWP.

Menurut Rahman (2010:42) Wajib Pajak akan memperoleh kemudahan pengurusan administrasi yang terkait dengan bisnis atau usaha yang dijalankan Wajib Pajak. Saat ini Wajib Pajak semakin sulit untuk menghindar dari kewajiban memiliki NPWP karena hampir semua sektor telah dipageri oleh pemerintah dengan prasyarat NPWP.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat terlihat bahwa kemudahan wajib pajak dalam perpajakan berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP.

2.2.2. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepemilikan NPWP

Menurut Winerungan (2013:967) bahwa dengan kurangnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya. Hal tersebut memberi informasi bahwa semakin baik memberi penyuluhan peraturan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan UMKM untuk memiliki NPWP.

Putri (2013:4) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab berpengaruhnya sosialisasi pajak dalam memiliki NPWP adalah adanya sumber informasi yang diterima oleh masing-masing Wajib Pajak dan sosialisasi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepemilikan NPWP.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP, karena sosialisasi pajak yang efektif dan efisien dan diterapkan sesuai dengan keadaan pengusaha umkm atau Wajib Pajak lainnya maka kepemilikan NPWP juga akan meningkat.

2.3. HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa :

H_1 : Kemudahan dalam perpajakan berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP

H_2 : Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepemilikan NPWP.

III. METODE PENELITIAN

3.1. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Metode deskriptif menurut Silalahi (2012:28):
"Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat."

Metode verifikatif menurut Mashuri (2008:45) dalam Umi Narimawati (2010:29) :

"Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dalam kehidupan."

Menurut Jonathan Sarwono (2006): Penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

3.2. OPERASIONALISASI VARIABEL

Menurut Umi Narimawati (2010:31): Mendefinisikan bahwa Operasionalisasi variabel adalah proses pengurai variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Hipotesis yang diuji melalui variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut :

1) Variabel Bebas atau *Independent*
Menurut Sekaran (2006), variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun secara negatif. Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah kemudahan dalam perpajakan (X1) dan sosialisasi pajak (X2)

2) Variabel Terikat atau *Dependent*
Variabel dependen menurut Uma Sekaran (2009:116) merupakan variabel menjadi perhatian utama peneliti. Maka variabel terikat penelitian ini adalah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3.3. SUMBER DATA

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Sujarweni, 2015:88). Pengumpulan data primer ini melalui cara menyebarkan kuisioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengen penelitian ini yaitu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cibaduyut Bandung.

3.4. Populasi, Sample dan Tempat serta waktu penelitian

3.4.1. POPULASI

Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peniliti, sebagai unit analisis penelitian. (Umi Narimawati, 2009:80). Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM Cibaduyut Bandung yang berjumlah 20 pengusaha.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2012:120).

Penulis menggunakan Teknik Slovin sebagai teknik pengambilan sampel karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus *respresentative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.

3.4.3 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

3.4.3.1 TEMPAT PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cibaduyut Bandung yang bertempat di Jalan Cibaduyut Raya no. 150, Kota Bandung.

3.4.3.2 WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2017.

3.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara Penelitian Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi
   Merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
b. Wawancara (*Interview*)
   Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2012:188). Wawancara dilakukan terhadap pegawai UPT Cibaduyut mengenai Kemudahan dalam perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Kepemilikan NPWP.
c. Kuesioner
   Kuesioner atau angket merupakan satu mekanisme pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara jelas apa yang di syaratkan dan bagaimana mengukur variabel yang diminati. Satu kuesioner atau angket adalah satu set tulisan tentang pertanyaan yang di formulasi supaya responden mencatat jawabannya, biasanya secara terbuka alternatif jawaban ditentukan (Silalahi, 2012:296). Kuesioner diajukan kepada pengusaha UMKM Cibaduyut.

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang ingin diukur, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi validitas suatu alat pengukur, maka alat pengukur tersebut semakin mengenai sasarannya, atau semakin menunjukan apa yang seharusnya diukur (Indrawati, 2015:147).

Validitas instrument ditentukan dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan atau pernyataan. Jika skor tiap butir pertanyaan berkorelasi secara signifikan dengan skor total pada tingkat alfa tertentu (misalnya 10%) maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur itu valid, dan berlaku sebaliknya. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai korelasi adalah korelasi *Pearson Product Moment* (Sugiyono, 2012: 248).

3.6.1.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner (Sujarweni, 2015:110).

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Kehandalan atau reliabilitas dengan nilai 0,6 atau kurang dari 0,6 secara umum mengindikasikan keandalan yang tidak memuaskan. Kuesioner yang dikatakan reliable jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Sujarweni, 2015:110).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. Hasil analisis deskriptif Kemudahan dalam perpajakan

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut variabel Kemudahan dalam perpajakan memperoleh nilai skor aktual sebesar 263. Nilai aktual tersebut bila dibandingkan dengan nilai ideal sebesar 400, memperoleh prosentase sebesar 65,75% berada pada kriteria cukup terletak pada interval 52,01 s/d 68%. Berdasarkan rekapitulasi hasil tanggapan responden seperti pada tabel 4.2, diketahui bahwa indikator kemudahan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan skornya yang paling besar yaitu sebesar 66,50% dan indikator kemudahan ketika membuat dan menghapus NPWP skornya yang paling kecil yaitu sebesar 65%.

4.1.2 Hasil analisis deskriptif Sosialisasi Pajak

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut variabel Sosialisasi pajak memperoleh nilai skor aktual sebesar 298. Nilai aktual tersebut bila dibandingkan dengan nilai ideal sebesar 400, memperoleh prosentase sebesar 74,50% berada pada kriteria baik terletak pada interval 68,01 s/d 84%. Berdasarkan rekapitulasi hasil tanggapan responden seperti pada tabel 4.5, diketahui bahwa indikator sebagai sarana informasi skornya yang paling besar yaitu sebesar 76% dan indikator tata cara sosialisasi skornya yang paling kecil yaitu sebesar 73%.

4.1.3 Hasil analisis deskriptif Kepemilikan NPWP

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut variabel kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)memperoleh nilai skor aktual sebesar 400. Nilai aktual tersebut bila dibandingkan dengan nilai ideal sebesar 400, memperoleh prosentase sebesar 61,50% berada pada kriteria cukup terletak pada interval 52,01 s/d 68%. Berdasarkan rekapitulasi hasil tanggapan responden seperti pada tabel 4.8, diketahui bahwa indikator menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan skornya yang paling besar yaitu sebesar 63% dan indikator sarana dalam administrasi perpajakan skornya yang paling kecil yaitu sebesar 60,50%.

4.1.4 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Data

4.1.5 Hasil Analisis Verifikatif

4.1.5.1 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model)*

1. Uji Validitas

a. *Convergent Validity*

Convergent Validity berhubungan dengan prinsip bahwa indikator dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji *convergent validity* dengan *software* PLS dapat dilihat dari nilai *outer loading* untuk setiap indikator konstruk, adapun untuk menilai *convergent validity* nilai *outer loading* harus lebih dari 0,5-0,6 tergolong cukup, sedangkan jika lebih dari 0,7 maka dikatakan tinggi, serta nilai *average variance extracted* (AVE) dan nilai *communality* harus lebih besar dari 0,5.

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai *outer loading* untuk setiap indikator mengenai kemudahan dalam perpajakandan sosialiasi pajak terhadap kepemilikan NPWPmemiliki nilai >0.7 yang berarti bahwa semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang baik dalam menjelaskan variabel latennya.

Dan jika dilihat dari nilai AVE dan nilai *communality* diatas untuk setiap variabel laten melebihi batas yang ditentukan yakni 0,5 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti 2013) yang berarti semua variabel laten memiliki validitas yang baik.

b. *Discriminant Validity*

Discriminant Validity dapat dilihat dari pengukuran *cross loading factor* dengan konstruk dan perbandingan akar AVE dengan korelasi variabel laten. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikator) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik dari konstruk lainnya (Yamin, 2009:222).

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, terlihat nilai *cross loading factor* setiap konstruk laten untuk indikator yang berkesesuaian lebih tinggi daripada konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten telah memenuhi syarat.

Berdasarkan uraian diatas, ukuran *cross loading factor* maupun perbandingan akar AVE dengan korelasi antar variabel latennya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *discriminant validity* pada variabel terlah terpenuhi.

2. Uji Reliabilitas

Berdasarkan tabel diatas, nilai *composite reliability* setiap variabel laten melebihi 0.7 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013) sehingga model dinyatakan memiliki reliabilitas tinggi.

3. Evaluasi *Fit Test of Combination Model* (seluruh model)

Uji kecocokan selutuh model gabungan *(fit test of combination model)* adalah uji kecocokan untuk memvalidasi model secara keseluruhan, menggukan nilai *Goodness of Fit* (GoF). GoF merupakan ukuran tunggal yang digunakan untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural yang diperoleh dari akar nilai rata-rata *communality* dikalikan dengan akar nilai rata-rata R-*square* (Vinzi, dkk, 2010 dalam Uce Indahyanti, 2013). Nilai GoF terbentang antara 0-1 dengan interprestasi 0,1 (GoF kecil); 0,25 (GoF moderat); dan 0,36 (GoF subastansial) (Uce Indahyanti, 2013).

4. Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai koefisien jalur struktural X1 terhadap Y sebesar 0,665 dan koefisien jalur X2 terhadap Y sebesar 0,504. Dari persamaan tersebut, terlihat bahwa koefisien jalur struktural variabel Kemudahan dalam Perpajakan (X_1) lebih besar dari Sosialisasi

Pajak (X_2), yang mengindikasikan bahwa penerapan Kemudahan dalam Perpajakan (X_1) cenderung memiliki pengaruh lebih besar dari pada Sosialisasi Pajak (X_2) terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *(*Y). Untuk melihat persentase pengaruh dari setiap variabel laten eksogen terhadap variabel endogen, berikut disajikan koefisien determinasi parsial dan simultan (R^2) yang merupakan hasil kali dari koefisien jalur struktural dengan korelasi dengan variabel laten endogen.

Selanjutnya penjelasan Analisis Koefisien Determinasi pada tabel 4.24 adalah sebagai berikut :

1. Penerapan kemudahan dalam perpajakan memberikan kontribusi sebesar 43,49% terhadap kepemilikan NPWP.
2. Sosialisasi pajak memberikan kontribusi sebesar 24,70% terhadap kepemilikan NPWP.
3. Pada tabel diatas terlihat nilai R-*square* yang diperoleh sebesar 0,6819 atau 68,19%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemudahan dalam perpajakan dan sosialiasi pajak secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 68,19% terhadap kepemilikan NPWP, sedangkan sebanyak (1-R-*square)* 131,81% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti (ζ).

5. **Pengujian Hipotesis**

Untuk melihat apakah pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel laten eksogen tersebut signifikan atau tidak, dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

a. Kemudahan dalam Perpajakan (X_1) terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Y) (Hipotesis 1)

H_0 : penerapan Kemudahan dalam Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak

H_a : penerapan Kemudahan dalam Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak

Taraf signifikan (α) yang digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%.

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Tolak H_0 dan terima H_a jika nilai $t_{hitung} > t_{kritis}$
2. Terima H_0 dan tolak H_a jika nilai $t_{hitung} < t_{kritis}$

Berdasarkan tabel diatas, nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 3,246. Nilai tersebut lebih besar dari 2,1000 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa kemudahan dalam perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP dengan kontribusi pengaruh sebesar 43,49%.

b. Pengaruh sosialiasi pajak (X_2) terhadap kepemilikan NPWP(Y) (Hipotesis 2)

H_0 : Sosialiasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan NPWP

H_a : Sosialiasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan NPWP.

Taraf signifikan (α) yang digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%.

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Tolak H_0 dan terima H_a jika nilai $t_{hitung} > t_{kritis}$
2. Terima H_0 dan tolak H_a jika nilai $t_{hitung} < t_{kritis}$

Berdasarkan tabel diatas, nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 3,246. Nilai tersebut lebih besar dari 2,1000 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa sosialiasi pajak terbukti berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP dengan kontribusi pengaruh sebesar 24,70%.

4.2. Hasil Pembahasan

4.2.1. Kemudahan dalam Perpajakan dan Sosialisasi pajak terhadap Kepemilikan NPWP

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kemudahan dalam Perpajakan terhadap Kepemilikan NPWP. Besarnya pengaruh Kemudahan dalam perpajakan terhadap kepemilikan NPWP tersebut sebesar 43,49% sedangkan sisanya sebesar 56,51% dipengaruhi oleh variabel lain seperti Pengaruh Kebutuhan memiliki NPWP, Pemahaman Wajib Pajak,dan lain-lain. Hubungan antara Kemudahan dalam Perpajakan dengan Kepemilikan NPWP bernilai positif yang berarti apabila kemudahan dalam perpajakan meningkat maka kepemilikan NPWP pun akan meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kemudahan dalam perpajakan dengan kepemilikan NPWP, dan menunjukkan bahwa jika kemudahan dalam perpajakan semakin baik maka akan diikuti dengan semakin baik pula kepemilikan NPWP.

Hal ini menjawab fenomena mengenai kemudahan dalam perpajakan menurut Kasi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi mengatakan bahwa Direktorat Jendral Pajak mencatat terdapat sekitar 8000 kios Di Blok A pasar tanah abang, tetapi baru sekitar 3000 pemilik kios yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Sayangnya, dari 3000 Wajik Pajak tersebut hanya sekitar 200 Wajib Pajak pemilik kios yang telah membayarkan pajaknya, dari 3000 Wajib Pajak tersebut rata-rata pembayaran pajaknya hanya 500rb, penyebab utama perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ini di karenakan masyarakat atau Wajib Pajak kesulitan memahami administrasi perpajakannya. Dan fenomena menurut Pak Teguh salah satu pegawai yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cibaduyut adalah dipersulitnya pengusaha UMKM untuk pengajuan kredit ke bank. Untuk pengajuan kredit ke bank dengan nilai di atas 50 juta salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kemudahan merupakan sesuatu hal yang membuat kita menjadi tidak sulit dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini dalam memiliki NPWP Wajib Pajak diberikan kemudahan dalam urusan perpajakannya dan dalam pembuatan NPWP itu sendiri. Kemudahan menurut Supriyadi (2011) menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan menghapus NPWP maupun dalam menjalankan hak serta kewajiban perpajakan setelah memilikinya. Di samping itu semakin tinggi faktor kemudahan dalam perpajakan semakin tinggi tingkat kepemilikan NPWP.

Menurut Rahman (2010:42) Wajib Pajak akan memperoleh kemudahan pengurusan administrasi yang terkait dengan bisnis atau usaha yang dijalankan Wajib Pajak. Saat ini Wajib Pajak semakin sulit untuk menghindar dari kewajiban memiliki NPWP karena hampir semua sektor telah dipageri oleh pemerintah dengan prasyarat NPWP.

Peneltiian tersebut tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lega Bestari (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kemudahan dalam perpajakan terhadap kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) (Studi Empiris Pada Pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru).

4.2.2. Pengaruh Sosialisasi pajak terhadap Kepemilikan NPWP

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Sosialiasi pajak terhadap kepemilikan NPWP. Besarnya pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepemilikan NPWP tersebut sebesar 24,70% sedangkan sisanya sebesar 75,3% dipengaruhi oleh variabel lain seperti Pengaruh manfaat yang dirasakan Wajib Pajak, Kepercayaan terhadap Aparat Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, dan lain-lain. Hubungan antara Sosialisasi Pajak dengan Kepemilikan NPWP memiliki pengaruh yang positif yang berarti apabila sosialiasi pajak meningkat maka kepemilikan NPWP pun akan meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sosialiasi pajak dengan kepemilikan NPWP, dan menunjukkan bahwa jika sosialiasi pajak semakin baik maka akan diikuti dengan semakin baik pula kepemilikan NPWP.

Hal ini menjawab fenomena mengenai sosialisasi pajak menurut Ketua Komisi II DPRD Sumenep mengatakan menilai rendahnya pembayaran Wajib Pajak itu di sebabkan karena kurangnya sosialisasi. Sebab, diakui atau tidak masyarakat enggan membayar pajak karena banyak masyarakat yang tidak sadar akan membayar pajak dan tidak paham tentang pajak. Sedangkan menurut Direktorat Jendrap Pajak mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi pajak berdampak pula pada pada penerimaan pajak negara. Berbagai strategi dilakukan pemerintah untuk menaikan kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, banyak faktor yang membuat Wajib Pajak tidak patuh akan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya. Dan fenomena menurut Pak Teguh salah satu pegawai yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cibaduyut adalah pernah di lakukakannya sosialisasi pajak terhadap pengusaha UMKM, namun para pengusaha tersebut tidak tertarik untuk menghadiri sosialisasi dikarenakan mereka takut jika di haruskan membayar pajak atau sejumlah uang dan malas untuk mengikuti dan memahami prosedur-prosedur yang diberikan dalam sosialisasi tersebut.

Hal ini sejalan denagn teori menurut Winerungan (2013:967) bahwa dengan kurangnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya. Hal tersebut memberi informasi bahwa semakin baik memberi penyuluhan peraturan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan UMKM untuk memiliki NPWP.

Penelitan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Desty Fitria Amanah, Akie Rusaktiva Rustam (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh parsial antara sosialiasi pajak terhadap kepemilikan NPWP.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai kemudahan dalam perpajakan dan sosialiasi pajak terhadap kepemilikan NPWP maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemudahan dalam perpajakan terhadap kepemilikan NPWP berpengaruh, ini berarti terdapat pengaruh antara Kemudahan dalam perpajakan terhadap kepemilikan NPWP. Dimana semakin meningkat Kemudahan dalam perpajakan berpengaruh maka akan diikuti oleh semakin meningkat kepemilikan NPWP. Dari hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa variabel Kemudahan dalam perpajakan berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP serta memiliki kontribusi.
2. Sosialiasi pajak terhadap kepemilikan NPWP berpengaruh, ini berarti terdapat hubungan antara Sosialiasi pajak terhadap kepemilikan NPWP. Dimana semakin meningkat Sosialiasi pajak maka akan diikuti oleh semakin meningkat kepemilikan NPWP. Dari hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialiasi pajak berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP memiliki kontribusi.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

a. Bagi Instansi

Secara keseluruhan kemudahan dalam perpajakan sudah cukup baik, tetapi belum sepenuhnya memenuhi Wajib Pajak karena masih ada Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP. Oleh karena itu hendaknya pemerintah meningkatkan sosialisasi dan publikasi tentang kemudahan ketika akan membuat NPWP serta mengetahui hak dan kewajiban dalam membayar pajak.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Pengembang Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pajak, serta berkontribusi dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai Kemudahan dalam Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kepemilikan NPWP serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembanca.

2. Bagi Peneliti Lain
   Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama tetapi dengan variabel, unit analisis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum.

VII. Daftar Pustaka

Anastasia Diana, Lilis Setiawati 2011. *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Proses dan Penerapan.* Edisi I. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Andi Supangat 2007. *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial, dan Nonparametik.* Edisi 1. Jakarta: Kencana.

Dantes 2012. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Andi

Gunadi, 2007. *Akuntansi Pajak.* Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Wydia Sarana Indonesia, Jakarta.

Husein Umar, 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada.

Iman Ghozali, 2006. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS,* Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang.

Imam Ghozali ,2013. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program IBM SPSS 21.* Edisi 7, Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang.

Jonathan Sarwono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kasiram, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif.* Malang: UIN Malang Press.

Mardiasmo, 2009. *Perpajakan.* Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi.

Marsyahrul, 2006. *Pemeriksaan Pajak Indonesia,* Jakarta: Grasindo.

Mashuri, 2008. *Penelitian Verifikatif.* Andi: Yogyakarta.

Muyatiningsih, 2012. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan.* Bandung: Alfabeta.

Priantara, 2011.

Rahman, 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan.* Bandung: Nuansa.

Rosdy Ruslan, 2003. *Metode Penelitian PR dan Komunikasi.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sekaran, 2006.

Silalahi, 2012. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT.Rafika Aditama.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Supriyadi, 2011.

Uma Sekaran, 2009. *Research Method for Business : Metodologi Penelitian untuk Bisnis.* Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati, 2010. *Penuisan Karya Ilmiah. Jakarta: Penerbit Genesis.*

Umi Narimawati, 2011. *Penulisan Karya Ilmiah.* Edisi Pertama, Genesis. Pondok Gede, Bekasi.

Undang-Undang No.28 Tahun 2007

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 7

LAMPIRAN

Tabel 4.2
Rekapitulasi hasil tanggapan pada variabel Kemudahan dalam perpajakan

No	Dimensi	Skor		%	Kriteria
		Aktual	Ideal		
1	kemudahan ketika membuat dan menghapus NPWP	130	200	65,00	Cukup
2	kemudahan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan	133	200	66,50	Cukup
Total		**263**	**400**	65,75	Cukup

Tabel 4.3
Tanggapan responden pada indikator kemudahan ketika membuat dan menghapus NPWP

Pernyataan		**Skor Jawaban**					**% Skor**	Kriteria
		1	**2**	**3**	**4**	**5**		
1.Wajib Pajak dapat dengan mudah membuat NPWP	F	3	1	7	7	2	64	Cukup
	%	15,00	5,00	35,00	35,00	10,00	64,00	
2.Wajib Pajak dapat dengan mudah menghapus NPWP	F	2	3	4	9	2	66	Cukup
	%	10,00	15,00	20,00	45,00	10,00	66,00	
Skor total							130	Cukup
Jumlah Skor total Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 20 x 5 = 100							65,00	
Jumlah Skor total Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 20 x2 x 5 = 200								

Tabel 4.4
Tanggapan responden pada indikator kemudahan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan

Pernyataan		**Skor Jawaban**					**% Skor**	Kriteria
		1	**2**	**3**	**4**	**5**		
3.Wajib Pajak diberikan kemudahan dalam urusan perpajakannya	F	1	4	7	5	3	65	Cukup
	%	5,00	20,00	35,00	25,00	15,00	65,00	
4.Wajib Pajak akan memperoleh kemudahan pengurusan administrasi yang terkait dengan bisnis atau usaha yang dijalani	F		4	7	6	3	68	Baik
	%	0,00	20,00	35,00	30,00	15,00	68,00	
Skor total							133	Cukup
Jumlah Skor total Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 20 x 5 = 100							66,50	
Jumlah Skor total Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 20 x2 x 5 = 200								

Tabel 4.5
Rekapitulasi hasil tanggapan pada variabel Sosialisasi pajak

No	Dimensi	Skor		%	Kriteria
		Aktual	Ideal		
1	sebagai sarana informasi	152	200	76,00	Baik
2	tatacara sosialisasi	146	200	73,00	Baik
Total		**298**	**400**	74,50	Baik

Tabel 4.6
Tanggapan responden pada indikator sebagai sarana informasi

Pernyataan		**Skor Jawaban**					**% Skor**	Kriteria
		1	**2**	**3**	**4**	**5**		
5.Sosialisasi pajak memiliki peran dalam meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP	F		3	3	12	2	73	Baik
	%	0,00	15,00	15,00	60,00	10,00	73,00	
6.Sosialisasi pajak memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai prosedur perpajakan	F	1	0	1	15	3	79	Baik
	%	5,00	0,00	5,00	75,00	15,00	79,00	
Skor total							152	Baik
Jumlah Skor total Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 20 x 5 = 100							76,00	
Jumlah Skor total Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 20 x2 x 5 = 200								

Tabel 4.7
Tanggapan responden pada indikator tata cara sosialisasi

Pernyataan		**Skor Jawaban**					**% Skor**	Kriteria
		1	**2**	**3**	**4**	**5**		
7.Tatacara sosialisasi pajak yang diberikan sudah sesuai dan mudah dimengerti	F		0	7	11	2	75	Baik
	%	0,00	0,00	35,00	55,00	10,00	75,00	
8.Dengan adanya tatacara sosialisasi pajak, Wajib Pajak dapat dengan mudah memiliki NPWP	F	0	1	10	6	3	71	Baik
	%	0,00	5,00	50,00	30,00	15,00	71,00	
Skor total							146	Baik
Jumlah Skor total Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 20 x 5 = 100							73,00	
Jumlah Skor total Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 20 x2 x 5 = 200								

Tabel 4.8
Rekapitulasi hasil tanggapan pada variabel kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

No	Dimensi	Skor		%	Kriteria
		Aktual	Ideal		
1	sarana dalam administrasi perpajakan	121	200	60,50	Cukup
2	anda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya	125	200	62,50	Cukup
3	dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakannya	62	100	62,00	Cukup
4	menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan	63	100	63,00	Cukup
Total		**246**	**400**	61,50	Cukup

Tabel 4.9
Tanggapan responden pada indikator tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Pernyataan		**Skor Jawaban**					**% Skor**	Kriteria
		1	**2**	**3**	**4**	**5**		
11.Dengan memiliki NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas Wajib Pajak yang sebenarnya	F		4	9	7		63	Cukup
	%	0,00	20,00	45,00	35,00	0,00	63,00	
12.Dengan memiliki NPWP Wajib Pajak memiliki bukti pembayaran pajaknya	F	1	5	7	5	2	62	Cukup
	%	5,00	25,00	35,00	25,00	10,00	62,00	
Skor total							125	Cukup
Jumlah Skor total Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 20 x 5 = 100							62,50	
Jumlah Skor total Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 20 x2 x 5 = 200								

Tabel 4.10
Tanggapan responden pada indikator sarana dalam administrasi perpajakan

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor	Kriteria
9.Dengan memiliki NPWP Wajib Pajak dapat dengan mudah membayar pajaknya	F	1	4	8	4	3	64	Cukup
	%	5,00	20,00	40,00	20,00	15,00	64,00	
10.Dengan memiliki NPWP Wajib Pajak akan dengan mudah menjalankan kewajiban perpajakannya	F	1	6	8	5		57	Cukup
	%	5,00	30,00	40,00	25,00	0,00	57,00	
Skor total							121	Cukup
Jumlah Skor total Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 20 x 5 = 100							60,50	
Jumlah Skor total Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 20 x2 x 5 = 200								

Tabel 4.11
Tanggapan responden pada indikator dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakannya

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor	Kriteria
13.NPWP harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan	F	1	7	3	7	2	62	Cukup
	%	5,00	35,00	15,00	35,00	10,00	62,00	

Tabel 4.12
Tanggapan responden pada indikator menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor	Kriteria
14.NPWP dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak	F	0	4	11	3	2	63	Cukup
	%	0,00	20,00	55,00	15,00	10,00	63,00	

Tabel 4.13
Rekapitulasi Hasil Variabel Kemudahan Dalam Perpajakan

Pernyataan	r korelasi	r kritis	Keterangan
Pernyatan 1	0,545	0,30	Vallid
Pernyataan 2	0,739	0,30	Vallid
Pernyataan 3	0,582	0,30	Vallid
Pernyataan 4	0,610	0,30	Vallid

Tabel 4.14
Rekapitulasi Hasil Variabel Sosialisasi Pajak

Pernyataan	r korelasi	r kritis	Keterangan
Pernyataan 5	0,648	0,30	Vallid

Pernyataan 6	0,644	0,30	Vallid
Pernyataan 7	0,590	0,30	Vallid
Pernyataan 8	0,527	0,30	Vallid

Tabel 4.15
Rekapitulasi Hasil Variabel Kepemilikan NPWP

Pernyataan	r korelasi	r kritis	Keterangan
Pernyaan 9	0,672	0,30	Vallid
Pernyataan 10	0,558	0,30	Vallid
Pernyaan 11	0,562	0,30	Vallid
Pernyataan 12	0,769	0,30	Vallid
Pernyaan 13	0,618	0,30	Vallid
Pernyataan 14	0,447	0,30	Vallid

Sumber: Data diolah menggunakan *software* SPSS

Tabel 4.16
Hasil uji reliabilitas kuesioner penelitian

Variabel	Indeks reliabilitas	Nilai kritis	Keterangan
Kemudahan dalam perpajakan	0,953	0.7	Reliabel
Sosialiasi pajak	0,951	0.7	Reliabel
Kepemilikan NPWP	0,7839	0.7	Reliabel

Tabel 4.17
Loading Factor

Outer Loadings

Matrix

	X1	X2	Y
X11	0.880		
X12	0.958		
X21		0.894	
X22		0.934	
Y1			0.778
Y2			0.877
Y3			0.776
Y4			0.710

Tabel 4.18
AVE

	AVE	Comunalty
Kemudahan dalam perpajakanX1	0,846	0,846
Sosialiasi pajak X2	0,835	0,835
Kepemilikan NPWP Y	0,620	0,620

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Tabel 4.19 Cross Loading Factor

	Kemudahan dalam perpajakan X1	Sosialiasi pajak X2	Kepemilikan NPWP *Y*
X1.1	0,880	-0,012	0,432
X1.2	0,958	-0,024	0,714
X2.1	-0,097	0,894	0,393
X2.2	0,043	0,934	0,493
Y1.1	0,672	0,122	0,778
Y1.2	0,636	0,336	0,877
Y1.3	0,381	0,355	0,776
Y1.4	0,351	0,688	0,710

Tabel 4.20
Perbadingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Laten

Variabel Laten	Akar Ave
X1	0,920
X2	0,914
Y	0,787

Korelasi Antar Var Laten			
	X1	**X2**	**Y**
X1	1		
X2	-0,021	1	
Y	0,654	0,490	1

Tabel 4.21
Composite Reliability

	Composite Reability
X1	0,846
X2	0,835
Y	0,620

Tabel 4.22
Hasil Nilai GoF

	Communality	R Square
Variabel Y	0,620	0,681
Perkalian	0,422	
Nilai GoF	0,557	

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Tabel 4.23
Nilai Koefisien Jalur Struktural dan Uji Signifikansi Hipotesis (*Path Coefficients*)

	Original Sample (O)	T Statistics (|O/STERR|)
Kemudahan dalam perpajakan($X_{1)}$ -> kepemilikan NPWP(Y)	0,665	5,372
Sosialiasi pajak ($X_{2)}$ -> kepemilikan NPWP(Y)	0,504	3,246

Tabel 4.24
Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

	Koefisien Jalur Struktural	Korelasi dengan NPWP (Y)	Pengaruh (%)
Kemudahan dalam Perpajakan **(X1)**	0,665	0,654	43,49%
Sosialisasi Pajak **(X_2)**	0,504	0,490	24,70%
TOTAL PENGARUH (R^2)			68,19%

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Tabel 4.25
Uji *t* kemudahan dalam perpajakan (X_1) terhadap Kepemilikan NPWP (Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X_1 -> Y	0,665	5,372	2,100	Ho ditolak	Signifikan

Tabel 4.26
Uji *t* sosialiasi pajak (X2) terhadap kepemilikan NPWP (Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X_2 -> Y	0,504	3,246	2,100	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan *software* PLS